

Analisis Implementasi E-Peken: Pemberdayaan Ekonomi Lokal Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Surabaya

Anfara Aisyanda Dzikrina¹, Olivia Putri Damayanti², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: 25040674204@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674208@mhs.unesa.ac.id², firmesuprpto@unesa.ac.id³, indahprabawati@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 05 Mei 2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 08 Juli 2026

Keywords: E-Peken, Pemberdayaan Ekonomi, Penanggulangan Kemiskinan, UMKM, Kecamatan Sawahan.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program E-Peken (Elektronik Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi) sebagai strategi penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara volume transaksi digital dan tren kemiskinan wilayah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder periode 2022-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program E-Peken efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, seperti yang ditunjukkan oleh akumulasi omzet yang mencapai Rp188 Miliar pada Agustus 2025. Peningkatan ini berkorelasi signifikan dengan penurunan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan dari 13.321 orang pada tahun 2023 menjadi 5.098 orang pada tahun 2025, serta tercapainya angka 0% untuk kemiskinan ekstrem. Kebijakan intervensi pemerintah melalui kewajiban belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berperan dalam keberhasilan program ini. Meskipun terdapat kendala teknis pada aplikasi, program ini terbukti mampu menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan krusial yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar, pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta peluang pasar di tingkat lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan nasional pada

Maret 2025 tercatat sebesar 8,47% atau sekitar 23,85 juta jiwa, yang merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir. Meskipun demikian, penurunan angka kemiskinan secara nasional belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Salah satu wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan adalah Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan pusat aktivitas ekonomi nasional, Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, ketimpangan pembangunan antar daerah di provinsi ini masih terlihat cukup jelas. Salah satu daerah yaitu Kota Surabaya, memang terkenal dengan keberhasilannya dalam menurunkan angka kemiskinan secara progresif. Namun, sebagai kota dengan jumlah penduduk yang besar, angka absolut penduduk miskin di Surabaya masih memerlukan perhatian serius karena adanya fenomena ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Surabaya pada Maret 2025 mencapai 105,09 ribu jiwa, atau sekitar 3,56 persen. Dari angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan masih memerlukan penguatan serta strategi yang lebih efektif. Kondisi ini juga menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat bantuan social atau bantuan tunai, tetapi juga melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya menjelaskan bahwa untuk mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan dengan pengembangan UMKM melalui sebuah aplikasi E-Peken yang diluncurkan untuk memulihkan roda perekonomian. Aplikasi berbasis daring ini sebelumnya diluncurkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada masa pandemi, yakni 31 Oktober 2021. Pada awalnya *customer* E-Peken hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemkot saja, lalu sejak 1 April 2022 E-Peken Surabaya telah dibuka untuk umum dengan mengakses transaksi E-Peken Surabaya melalui <https://peken.surabaya.go.id>. Meskipun pada bulan Januari-Juli 2022 aplikasi E-Peken telah mencatat total transaksi sebesar Rp. 19,2 Miliar yang artinya masyarakat Kota Surabaya telah memiliki kepercayaan untuk melakukan transaksi ekonomi di E-Peken Surabaya dan juga pada tahun 2023 capaian omzet pun meroket tajam hingga totalnya Rp 60 miliar. Tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi E-Peken tersebut, seperti terjadinya *bug* pada aplikasi ketiga digunakan, *error* saat akan *login* ke dalam aplikasi, dan lain sebagainya.

Namun demikian, efektivitas dari program pemberdayaan masyarakat tersebut dalam menurunkan angka kemiskinan secara langsung di Kota Surabaya, terutama di Kecamatan Sawahan yang dikenal dengan kawasan permukiman yang sangat padat dan sempit, seringkali dikategorikan sebagai wilayah rentan kemiskinan perkotaan ini masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah intervensi yang dilakukan telah benar-benar mencapai sasaran serta mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Selama ini, kajian mengenai program penanggulangan kemiskinan masih cenderung berfokus pada indikator statistik kemiskinan secara makro, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika implementasi program di tingkat lokal. Keberhasilan sebuah kebijakan publik dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada mekanisme implementasi yang tepat dan bagaimana kelompok sasaran merespon inovasi (Izaak et al., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengaruh efektivitas program pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat serta menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut.

LANDASAN TEORI

1. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi perhatian utama dalam kebijakan pembangunan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini, kemiskinan dipahami melalui tiga perspektif utama, yakni:

a. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap peluang pasar lokal. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan struktural adalah dengan meningkatkan kemandirian ekonomi di sekitar potensi lokal (Akbhari et al., 2023).

b. Kemiskinan Multidimensional

Tidak hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan aset, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya layanan kesehatan yang memadai (World Bank, 2004).

c. Faktor Penyebab Kemiskinan

Meliputi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi, terbatasnya kesempatan kerja, serta kurang memadainya fasilitas pendidikan dan kesehatan (Jufriadi, 2016).

2. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kebijakan pembangunan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk kemiskinan. Konsep pemberdayaan masyarakat menekankan pada upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan serta mampu mengakses berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Edi Suharto). Fokus pemberdayaan di sini diarahkan pada ekonomi lokal melalui inovasi digital Program E-Peken, yang memfasilitasi UMKM, toko kelontong, dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) untuk bertahan di era digital.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik (George C. Edwards III)

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurut George C. Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan.

1) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan

kepada pelaksana maupun kepada kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat mengenai tujuan serta mekanisme pelaksanaan program. Penerapannya dalam program E-Peken di kecamatan Sawahan adalah dengan sosialisasi masif mengenai cara mendaftar serta instruksi penggunaan E-Peken kepada toko kelontong di kelurahan-kelurahan Sawahan.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial, fasilitas, serta informasi yang mendukung pelaksanaan program. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program secara efektif. Penerapannya dalam program E-Peken di Kecamatan Sawahan yakni dengan pelatihan digital bagi pelaku usaha oleh staf kecamatan yang kompeten, serta pendamping UMKM yang diperlukan untuk membantu beberapa warga yang masih gaptek untuk mengunggah produknya dalam E-Peken.

3) Sikap atau Disposisi (*Disposition*)

Disposisi Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan berkaitan dengan komitmen, integritas, serta kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan akan lebih mampu menjalankan program secara optimal. Dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat, sikap pelaksana kebijakan juga berkaitan dengan kemampuan mereka dalam memahami kondisi sosial masyarakat serta merumuskan strategi yang tepat dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan program. Penerapannya dalam program E-Peken di Kecamatan Sawahan yakni Ketersediaan ASN untuk menjadi "*market*" pertama bagi produk lokal, juga peran Camat dan Lurah dalam mengawal program ini.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik akan memudahkan proses implementasi kebijakan serta mengurangi potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antar instansi. Penerapannya dalam program E-Peken di Kecamatan Sawahan adalah SOP yang memudahkan verifikasi toko kelontong baru untuk masuk aplikasi, juga harus memiliki alur yang jelas apabila terjadi kendala teknis dari pedagang di E-Peken maupun keluhan dari pembeli. Selain itu juga diperlukannya koordinasi antara Dinas Koperasi & Perdagangan dengan pihak Kecamatan Sawahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan program E-Peken.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengkaji hubungan antar variabel secara objektif melalui analisis statistik. Metode asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji secara empiris sejauh mana pengaruh efektivitas program pemberdayaan masyarakat terhadap

penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Melalui analisis statistik, penelitian ini berfokus pada pengukuran kontribusi program pemberdayaan masyarakat dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat penerima manfaat. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana implementasi program tersebut mampu beradaptasi dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi lokal dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Penelitian ini mengkaji sejauh mana implementasi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah di Kota Surabaya, lebih tepatnya Kecamatan Sawahan ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini juga mencakup peran koordinasi antar lembaga dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

Penelitian ini dibatasi secara spasial dan temporal yakni mencakup wilayah administratif Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik wilayah yang merupakan kawasan permukiman padat dan tergolong rentan terhadap fenomena kemiskinan perkotaan. Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2022 hingga 2025. Penentuan tahun 2022 sebagai titik awal didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mulai membuka akses transaksi E-Peken secara luas bagi masyarakat umum pada 1 April 2022, setelah sebelumnya terbatas hanya untuk lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini memungkinkan analisis dampak ekonomi yang lebih komprehensif terhadap masyarakat lokal.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiyono (2019:126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan transaksi program E-Peken (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi) dan data statistik kemiskinan di Kota Surabaya sejak program diluncurkan hingga periode tahun 2025.

Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019:217), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi E-Peken di Kecamatan Sawahan dan angka penduduk miskin di Kecamatan Sawahan dalam kurun waktu 2022-2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Spasial: Data yang khusus mencakup wilayah Kecamatan Sawahan, Kota

Surabaya, sebagai wilayah yang dikategorikan rentan kemiskinan perkotaan.

2. Data Temporal: Data deret waktu (*time series*) laporan transaksi E-Peken (seperti omzet dan jumlah transaksi) serta angka penduduk miskin di Kecamatan Sawahan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025.

3. Sumber Data: Data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya dan Laporan Kinerja instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Dengan menggunakan sampel *safety data time series* tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan analisis yang akurat dan objektif mengenai kontribusi nyata program E-Peken terhadap tren penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, melalui hasil olah data statistik resmi.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan satu jenis data, yakni data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan, maupun publikasi statistik. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik, laporan pemerintah daerah, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan data angka transaksi E-Peken serta data kemiskinan dari laporan resmi BPS dan instansi terkait.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel Bebas (X): Efektivitas Program Pemberdayaan

Variabel ini digunakan untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan masyarakat mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Variabel Terikat (Y): Penurunan Angka Kemiskinan

Variabel ini digunakan untuk mengukur perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah mengikuti program pemberdayaan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai referensi ilmiah seperti buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta implementasi kebijakan publik. Hal ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dalam menganalisis fenomena yang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen meliputi laporan transaksi program E-Peken di Kecamatan Sawahan dan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya.

7. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menyajikan fluktuasi angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan serta perkembangan volume transaksi E-Peken dari tahun 2022 hingga 2025 dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram.

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel efektivitas program pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan angka kemiskinan.

3. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel efektivitas program pemberdayaan masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas program pemberdayaan ekonomi melalui aplikasi E-Peken (Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan fokus penelitian di Kecamatan Sawahan. Sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi yang sangat kompleks dengan permasalahan sosial ekonomi, termasuk kemiskinan. Karena tingginya tingkat kemiskinan, Kecamatan Sawahan seringkali dijadikan target implementasi program pemerintah seperti E-Peken ini. Program E-Peken merupakan salah satu inovasi digital yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pemilik toko kelontong, juga SWK (Sentra Wisata Kuliner) melalui sistem perdagangan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan program bantuan sosial, sebagai upaya menekan angka kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan melalui portal resmi Pemerintah Kota Surabaya, laporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Dinkopdag), serta publikasi Satu Data Surabaya, berikut adalah perkembangan data yang menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Data yang disajikan telah melalui proses sinkronisasi untuk memastikan validitas antara jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan realisasi transaksi yang tercatat secara sistemik. Penyajian data mencakup rentang waktu tahun 2022 hingga 2025, yang menggambarkan fase awal implementasi hingga tahap stabilisasi program. Deskripsi data ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana variabel efektivitas program mampu memberikan dampak nyata terhadap variabel kesejahteraan masyarakat di tingkat kecamatan.

2.1 Data Omzet Transaksi E-Peken

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan omzet E-Peken baik secara tahunan maupun kumulatif untuk menunjukkan tren pertumbuhan program secara makro di Kota Surabaya. Data ini menunjukkan jumlah aktivitas ekonomi digital yang dihasilkan oleh intervensi kebijakan pemerintah yakni peningkatan penjualan merupakan indikator utama keberhasilan ekspansi pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan melihat tren transaksi yang positif, kita dapat melihat seberapa besar platform digital dapat meningkatkan perputaran modal, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan ekonomi di seluruh wilayah, termasuk Kecamatan Sawahan.

Tabel. 1 Petrckembangan Omzet E-Peken Tahun 2021-2025

Tahun	Total Omzet	Keterangan
2021	5 Miliar	Awal Peluncuran
2022	35 Miliar	Ekspansi UMKM
2023	60 Miliar	Data Final 2023
2024	151,5 Miliar	Lonjakan Transaksi
2025	188 Miliar	Per Agustus 2025

Sumber: Data Diolah (2026)

2.2 Data Penduduk Miskin Kecamatan Sawahan (Variabel Y)

Tabel ini menunjukkan dinamika jumlah penduduk miskin di lokasi penelitian selama periode pengamatan. Data kemiskinan ini disajikan sebagai variabel output untuk mengukur seberapa efektif program pemberdayaan ekonomi yang telah dilaksanakan. Tabel berikut menunjukkan fluktuasi angka yang menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sawahan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti standar verifikasi data pemerintah dan efek dari intervensi program Padat Karya melalui aplikasi E-Peken.

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Sawahan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Status Progres
2022	10.258 Jiwa	-
2023	13.321 Jiwa	Naik
2024-2025	5.098 Jiwa	Turun Signifikan

*Sumber: Dinas Sosial & Satu Data Surabaya (2026) *Data 2024/2025 menggunakan angka terbaru dari portal Satu Data Surabaya.*

3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan deskripsi data yang telah disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2, bagian ini akan menganalisis secara menyeluruh hubungan antara peningkatan volume transaksi pada aplikasi E-Peken dan tren penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan. Analisis dilakukan dengan melihat sejauh mana peningkatan omzet usaha dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan seberapa efektif program tersebut dalam konteks transformasi sosial-ekonomi di wilayah penelitian.

3.1 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Digital (E-Peken)

Data menunjukkan bahwa akan ada peningkatan besar dalam volume transaksi E-Peken, terutama pada tahun 2024. Berdasarkan data kumulatif, peningkatan omzet tahunan dari Rp60 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp151,5 miliar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program ini telah melalui tahap adaptasi dan sekarang memasuki tahap pertumbuhan besar. Akselerasi ini menunjukkan bahwa ekosistem ekonomi digital Surabaya, terutama di lokus Kecamatan Sawahan, telah berkembang secara konsisten. Kecamatan Sawahan sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Surabaya berkontribusi signifikan terhadap capaian transaksi tersebut melalui keterlibatan para pelaku UMKM dan Toko Kelontong lokal. Tercatat bahwa selama periode penelitian, jumlah toko di wilayah Sawahan yang secara aktif menggunakan platform E-Peken meningkat. Ini menunjukkan upaya mereka untuk memperluas pangsa pasar, terutama dari kalangan ASN.

Faktor utama yang mendorong lonjakan ini adalah kebijakan strategis Pemerintah Kota Surabaya yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berbelanja

kebutuhan pokok melalui aplikasi E-Peken. Kebijakan ini secara langsung memberikan jaminan pasar bagi usaha kecil dan menengah (UMKM) dan toko grosir yang terdaftar. Untuk daerah seperti Kecamatan Sawahan, di mana banyak bisnis mikro, keamanan serapan pasar sangat penting untuk mempertahankan arus kas mereka, yang sebelumnya sangat bergantung pada transaksi konvensional yang fluktuatif.

Selain itu, ada dinamika yang menarik pada tahun 2023 jika dikorelasikan dengan data yang ditunjukkan pada Tabel 4.2. Jumlah orang miskin di Kecamatan Sawahan meningkat menjadi 13.321 orang, meskipun nilai penjualan E-Peken meningkat menjadi Rp 60 miliar. Seperti yang ditunjukkan oleh fenomena ini, peningkatan angka tersebut tidak disebabkan oleh kegagalan program, tetapi sebaliknya yakni proses verifikasi dan validasi data yang lebih ketat dan jelas yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya pada tahun tersebut adalah penyebabnya. Untuk memastikan bahwa tujuan intervensi ekonomi melalui E-Peken menjadi lebih tepat sasaran di tahun-tahun berikutnya (2024-2025), fase ini merupakan langkah sinkronisasi.

Efektivitas ini terbukti pada tahun 2024, ketika transaksi mencapai Rp 151,5 Miliar dan kemiskinan di Kecamatan Sawahan turun drastis menjadi 5.098 orang. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi digital yang difasilitasi oleh platform E-Peken memiliki korelasi positif yang signifikan dengan pengurangan beban ekonomi masyarakat di wilayah penelitian.

3.2 Hubungan Omzet E-Peken dengan Penurunan Kemiskinan

Penurunan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan dan peningkatan akumulasi transaksi memiliki korelasi yang signifikan. Analisis data menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan sempat meningkat menjadi 13.321 jiwa pada tahun 2023, diduga sebagai akibat dari proses sinkronisasi dan verifikasi data kemiskinan oleh Pemerintah Kota Surabaya, angka tersebut berhasil ditekan secara signifikan hingga 5.098 jiwa pada tahun 2024-2025.

Penurunan lebih dari 50% dari populasi miskin ini menunjukkan bahwa uang yang diputar melalui aplikasi E-Peken benar-benar diserap oleh bisnis di tingkat akar rumput, bukan hanya angka statistik. Pedagang kecil dan toko kelontong di wilayah Sawahan, yang sekarang memiliki pangsa pasar tetap, mengalami peningkatan pendapatan harian sebagai hasil dari mekanisme ini. Dengan meningkatnya margin keuntungan dan stabilitas pendapatan maka taraf kesejahteraan keluarga pelaku usaha meningkat secara mandiri, yang secara otomatis mengeluarkan mereka keluar dari kategori penduduk miskin atau pra-sejahtera.

Efektivitas ini juga dipengaruhi oleh integrasi program Padat Karya yang seringkali berjalan beriringan dengan ekosistem E-Peken. Aplikasi ini memberikan akses pasar langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Sawahan yang bekerja dalam produksi UMKM dan bisnis jasa lainnya. Ini menyebabkan siklus ekonomi tertutup di tingkat lokal, juga dikenal sebagai ekonomi sirkular lokal. Dalam siklus ini, dana yang dialokasikan oleh masyarakat umum dan ASN diputar kembali untuk meningkatkan daya beli warga di wilayah yang sama. Oleh karena itu, E-Peken berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi produktif, bukan hanya memberikan bantuan sosial konsumtif.

3.3 Efektivitas Program dalam Menekan Kemiskinan Ekstrem

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu capaian paling penting dari penelitian ini adalah tercapainya target nol jiwa (0%) untuk kategori Miskin Ekstrem di Kecamatan

Sawahana dari tahun 2024 hingga 2025. Mengingat Kecamatan Sawahan secara historis memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, pencapaian ini merupakan bukti keberhasilan yang sangat kuat. Ini menunjukkan bahwa program E-Peken, jika digunakan bersamaan dengan skema Padat Karya, akan efektif dalam menasar lapisan masyarakat yang paling rentan (*the bottom of the pyramid*) melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Paradigma bantuan sosial dapat diubah menjadi skema kemandirian ekonomi melalui kemampuan E-Peken untuk mengubahnya dari sekedar jaring pengaman (*safety net*). Dalam ekosistem ini, kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam kategori miskin ekstrem diberikan ruang untuk menjadi produsen maupun penyedia jasa yang hasilnya langsung diserap oleh sistem belanja pemerintah.

Meskipun masih ada beberapa kendala teknis dalam implementasinya, seperti masalah antarmuka aplikasi (*user interface*), gangguan sistem (*bug*), dan masalah *login* untuk pengguna baru, namun hal ini tidak mengurangi keberhasilan program secara keseluruhan. Terbukti bahwa kekurangan teknis tersebut dapat diatasi dengan dukungan kebijakan (*political will*) dari Pemerintah Kota Surabaya, terutama dalam hal pendampingan ketat oleh Satgas Mandiri di setiap kelurahan. Oleh karena itu, tujuan utama program, yaitu menciptakan kedaulatan ekonomi UMKM dan menghilangkan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Sawahan, tetap tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

4. Pembuktian Hipotesis

Hasil analisis data deskriptif tentang pertumbuhan penjualan E-Peken dan dinamika jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1): Efektivitas program E-Peken berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan. Hasil: Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Sawahan akan sangat menurun seiring dengan peningkatan omzet tahunan E-Peken, yang akan mencapai puncak pertumbuhannya pada tahun 2024 (sebesar ± Rp 91,5 Miliar). Dari 13.321 orang pada tahun 2023 menjadi hanya 5.098 orang pada tahun 2024/2025. Kesimpulan: Adanya korelasi negatif yang kuat antara peningkatan ekonomi digital melalui E-Peken dan penurunan tingkat kemiskinan lebih dari 50%. Hal ini membuktikan bahwa Hipotesis Pertama (H1) Diterima.

2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2): Keberhasilan program E-Peken sangat dipengaruhi oleh kebijakan intervensi pemerintah melalui kewajiban belanja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil: Berdasarkan data pertumbuhan transaksi, kebijakan wajib belanja bagi ASN di Pemerintah Kota Surabaya diperkuat, yang menyebabkan peningkatan total omzet hingga Rp 188 Miliar pada Agustus 2025. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Sawahan memiliki pasar yang stabil stabil (*captive market*) yang diciptakan oleh intervensi kebijakan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program E-Peken mendorong ekonomi lokal dan menjadi strategi yang efektif untuk memerangi kemiskinan di Kecamatan Sawahan. Peningkatan akumulasi transaksi mencapai Rp 188 Miliar pada Agustus 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi digital yang luar biasa. Ini berkorelasi signifikan dengan penurunan lebih dari 50% jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sawahan, dari 13.321 jiwa pada tahun 2023 menjadi 5.098 jiwa

pada tahun 2025. Faktor utama yang mendorong keberhasilan program ini adalah intervensi kebijakan pemerintah melalui kewajiban belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Intervensi ini menciptakan pasar (*captive market*) yang stabil untuk UMKM dan toko kelontong di wilayah Sawahan. Keberhasilan paling penting adalah tercapainya target nol jiwa (0%) untuk kategori miskin ekstrem di wilayah penelitian. Ini menunjukkan bahwa penggabungan ekonomi digital dengan program Padat Karya mampu menysasar kelompok masyarakat yang paling rentan secara tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Akbhari, I., & Prathama, A. (2023). Inovasi Aplikasi E-Peken : Optimalisasi Potensi UMKM Kota Surabaya. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 396–409.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). *Data Kemiskinan Nasional Maret 2025*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2025). *Data Penduduk Miskin Kota Surabaya Menurut Kecamatan*. Surabaya: BPS Kota Surabaya.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Surabaya. (2025). *Laporan Realisasi Transaksi Aplikasi E-Peken Tahun 2022-2025*. Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Izaak, W. C., Azizah, N., & Kriswibowo, A. (2020). Penguatan UMKM Melalui Penerapan Servicescape Model Untuk Meningkatkan Jangkauan Pemasaran Di Kecamatan Sawahan Surabaya. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 1(01).
- Jufriadi. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sampang, Madura. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Penanggulangan Kemiskinan dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- World Bank. (2004). *World Development Report: Making Services Work for Poor People*. Washington, DC: World Bank.